

Judul	Goodbye Resesi! Menggantungi Asa Lebih Tinggi
Nama Media	Info Bank
Newstrend	Kinerja Industri Asuransi Jiwa Semester I/2021
Halaman/URL	88
Tanggal Berita	2021-09-02
Sentimen	Positif

INSURANCE DIGEST

Goodbye Resesi! Menggantung Asa Lebih Tinggi

Transformasi dan inovasi menjadi kunci bagi industri asuransi tetap *sustain* di masa pandemi. Adanya perusahaan asuransi yang “batuk-batuk” tak mencerminkan industri ini secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi 7% bisa jadi modal, tapi jangan terlena.

Oleh BAGUS KASANJANU

EKONOMI nasional perlahan mulai bangkit. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, di kuartal kedua 2021 ekonomi tumbuh 7,07% secara tahunan. Indonesia pun resmi keluar dari resesi.

Ini menjadi angin segar bagi seluruh pelaku bisnis, tak terkecuali industri asuransi. Sektor asuransi jiwa, yang sempat mengalami tekanan berat tahun lalu akibat pandemi, mulai bangkit. Kinerjanya mengalami pertumbuhan positif di semester pertama tahun ini. Bahkan, preminya tumbuh *double digit*.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Budi Tampubolon, mengemukakan, pertumbuhan itu tak lepas dari kesadaran serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan asuransi di masa pandemi. “Beberapa hal yang sudah dilakukan industri asuransi jiwa tentunya adalah mencoba terus berinovasi,” katanya, bulan lalu.

Menurut Budi, persoalan yang tengah melilit beberapa perusahaan asuransi jiwa tak serta-merta menggambarkan kondisi industri secara umum. Masih jauh lebih banyak perusahaan asuransi yang sehat ketimbang yang “batuk-batuk”.

Karena itu, para pelaku industri

sepakat bahwa *GCG* dan *risk management* harus terus dijunjung tiap perusahaan asuransi dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu pemain besar di industri asuransi jiwa, yakni Prudential Indonesia, mengklaim terus mengedepankan dua poin tersebut dalam pelaksanaan bisnisnya.

President Director Prudential Indonesia, Jens Reisch mengatakan, agar perusahaan asuransi dapat bertahan di masa sekarang, kuncinya adalah transformasi dan inovasi, termasuk untuk agen. “Kami membekali seluruh agen dengan *training development supervision* agar mereka profesional dan *good*

advice,” katanya.

Untuk mengimbangi inovasi dan transformasi yang dilakukan pelaku industri, dari sisi aturan dan regulasi perlu ditingkatkan. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) II OJK, M. Ihsanudin, mengungkapkan, pihaknya akan melakukan penguatan pengawasan berbasis teknologi yang meliputi *security system* dan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, juga meningkatkan perlindungan konsumen.

“Jadi, beberapa hal itu menjadi program atau strategi kita ke depan dan tentunya akan kami komunikasikan dengan para pelaku dan asosiasi, sehingga nanti dalam proses *making rules*-nya itu menjadi lebih lancar dan lebih baik,” tegasnya.

Jika pengawasan berbasis teknologi ini nantinya benar-benar terealisasi, tentu akan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan OJK dalam pengawasan di industri jasa keuangan, khususnya sektor perasuransian. Selain itu, yang tak kalah penting untuk ditingkatkan ialah terkait dengan perlindungan konsumen. Sehingga, jika suatu saat muncul permasalahan gagal bayar atau semacamnya, kepercayaan publik terhadap asuransi tidak akan terganggu. ●

“Dalam kajian kami, ada 22 perusahaan asuransi jiwa anggota AAJI yang memasarkan produk *saving plan*. Dan, bukan berarti seluruhnya bermasalah. Mungkin ada dua sampai tiga yang bermasalah, tapi sekian belasnya tidak. Setelah kita lihat, *at the end of the day*, bedanya ada di tata kelola dan pengelolaan risiko di dalamnya,”



Budi Tampubolon,
Ketua Dewan Pengurus AAJI.

Judul	Astra Life luncurkan produk ASLI Flexi Life Protection
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Produk Asuransi Jiwa ASLI FLEXI LIFE PROTECTION
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/astra-life-luncurkan-produk-asli-flexi-life-protection
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

Astra Life luncurkan produk ASLI Flexi Life Protection

Rabu, 01 September 2021 / 22:15 WIB

[f](#)
[t](#)
[w](#)
[in](#)
[s](#)
[id](#)
[id](#)
[id](#)
[id](#)
[id](#)
[id](#)



Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asuransi jiwa dipilih menjadi salah satu sumber utama perlindungan finansial bagi keluarga. Tanpa perlindungan jiwa terutama untuk si pencari nafkah, finansial keluarga akan terganggu jika risiko kesehatan hingga risiko meninggal dunia sewaktu-waktu terjadi. Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Hal ini membuat kesadaran masyarakat dan kebutuhan akan layanan proteksi jiwa semakin tinggi.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi jiwa, didukung juga dengan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan pendapatan premi dari penjualan asuransi tradisional meningkat 22% (*year-on-year*/YoY) menjadi Rp 40,3 triliun pada kuartal kedua 2021.



Menjawab kebutuhan perlindungan jiwa tersebut, PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) menghadirkan ASLI Flexi Life Protection.

"Produk ASLI Flexi Life Protection mengedepankan fleksibilitas dalam mengatur manfaat asuransi sesuai dengan perubahan gaya hidup maupun kebutuhan nasabah di setiap tahap kehidupan. Produk yang kami pasarkan melalui jalur distribusi *direct channel* ini dapat memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga Rp 5 miliar", ujar Windawati Tjahjadi, Presiden Direktur Astra Life dalam siaran pers, Rabu (1/9).

Baca Juga: [Butuh dana segar? Begini tips tarik dana unitlink](#)

Manfaat produk ASLI Flexi Life Protection adalah manfaat meninggal dunia sebesar 100% uang pertanggungan yang akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia.

ASLI Flexi Life Protection menghadirkan tiga keunggulan, pertama, nasabah dapat memiliki produk tanpa melalui pemeriksaan medis, dengan uang pertanggungan hingga Rp 5 miliar. Kedua, produk ini menawarkan fleksibilitas dalam memilih uang pertanggungan, masa pertanggungan serta masa pembayaran premi sesuai kebutuhan dan kemampuan nasabah.

Ketiga, nasabah dapat mengubah uang pertanggungan, masa pertanggungan dan masa pembayaran premi dalam masa pertanggungan sesuai keinginan.

Selain 3 keunggulan di atas, premi ASLI Flexi Life Protection juga terjangkau, dengan premi mulai dari Rp 58.000/tahun. Calon nasabah juga dapat memilih masa pertanggungan mulai dari 1 tahun hingga 67 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis hingga nasabah mencapai usia 85 tahun.

Produk ini melengkapi rangkaian produk yang dipasarkan melalui jalur distribusi *direct channel* Astra Life yaitu ASLI Rencana Optima, AVA iBright Protector, ASLI iSignature Protector, dan AVA Proteksi Optima 117.

Selanjutnya: [Hingga semester I-2021, Maximus Insurance cetak laba Rp 12,6 miliar](#)

Judul	AIA dan Gopay Hadirkan Asuransi Bagi Para Gamers
Nama Media	Harianaceh.co.id
Newstrend	Produk Asuransi Kesehatan Proteksi Gamers AIA Financial
Halaman/URL	https://www.harianaceh.co.id/2021/09/01/aia-dan-gopay-hadirkan-asuransi-bagi-para-gamers/
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

HOME / TEKNOLOGI

AIA dan Gopay Hadirkan Asuransi Bagi Para Gamers

Asuransi Mobil Komersial - Asuransi Mobil Pribadi - Konsultasi asuransi

Asuransi Mobil Komersial - Asuransi Mobil Pribadi - Konsultasi asuransi

AIA hadirkan proteksi gamers untuk kenakan asuransi ke kaum muda pelaku eSports

JAKARTA — PT AIA Financial (AIA) kembali berkolaborasi dengan Gajik, Super App terdepan di Asia Tenggara. AIA bersama GoPay menghadirkan produk asuransi untuk gamers di fitur GoSure sebagai terobosan untuk meningkatkan proteksi dan akses masyarakat kepada produk asuransi.

Studi dari Harvard menyatakan kekhawatiran akan dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan, dengan ditemukannya peradangan Sindrom Lorum Karpal yang menyebabkan saraf tertangkap di area pergelangan tangan pada gamers dan masyarakat umum yang memiliki kebiasaan menggunakan gadget secara intensif.

Di Indonesia, Esport telah menjadi industri yang tumbuh berkembang, dengan kisaran 44,2 juta pemain per Maret 2021 memberikan indikasi kebutuhan yang besar terhadap proteksi.

AIA ADS
Capitol Advertising Network

Chief Marketing Officer AIA, Kellyn Morika Peragap mengawali kolaborasi AIA bersama GoPay dalam menghadirkan produk asuransi AIA di platform GoSure merupakan babak baru bagi pelaku di industri asuransi, hal ini juga menjadi bagian penting dari pilar strategi AIA dalam memberikan layanan finansial dan program health and wellness untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik.

"Inisiatif kami hadir untuk mengenalkan manfaat asuransi kepada kalangan muda penyuka game juga pelaku esport di Indonesia. Proteksi Gamers ini juga menjawab kebutuhan masyarakat sering dengan meningkatnya penggunaan gadget berdampak pada kebutuhan proteksi dari risiko kesehatan yang meningkat," ucap dia.

Make your own luck in the jungle 20K multiplier
Start winning
bilibili.com

BACA JUGA

- Suami Ngapik Tak Kunjung Selesai, Perempuan di Bicara Ini Menunggu Histeris
- GoTo Ingin Manfaat Konten Disajikan Lebih Banyak UMRM
- Kembangkan Kompetensi UMRM GoTo Financial Luncurkan Kontag
- Faktor Pendorong Daya Saling Penjualan

Chief Marketing Officer, GoPay, Fitriyanti Basila, menjelaskan, GoPay melalui GoSure terus mengembangkan produk asuransi milenial yang dibutuhkan untuk melindungi pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak terkecuali profesi gamers yang juga rentan terhadap risiko. Produk asuransi ini menawarkan premi terjangkau, proses klaim yang sederhana dan bisa dilakukan di aplikasi Gajik dengan pembayaran lewat GoPay yang mudah dan aman.

Produk Gamers tersedia untuk masyarakat umum berusia 18-45 tahun, menawarkan premi sangat terjangkau mulai Rp. 15 ribu dengan manfaat perlindungan selama satu tahun terhadap risiko kesehatan jantung, mata, dan pengelangan tangan seperti Sindrom Lorum Karpal yang menyebabkan saraf tertangkap di area pergelangan tangan, dengan manfaat biaya perawatan juga Daily Hospital cash benefit.

www.pusino.com

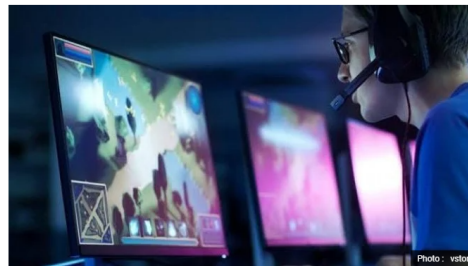
Selain proteksi Gamers, AIA telah meluncurkan perlindungan untuk Personal Accident dan Cancer Insurance melalui platform GoSure bekerja sama dengan Insur insi, modul Personal Accident memberikan uang penghargaan hingga Rp. 100 juta dengan premi terjangkau mulai dari Rp. 25 ribu. Sedangkan, Cancer Insurance bisa diperoleh dengan premi mulai dari Rp. 15 ribu untuk perlindungan hingga 10 juta, seluruh produk asuransi AIA kolaborasi dengan GoPay dapat diperoleh dengan metode satu kali pembayaran premi atau single premium.

Judul	Kelamaan Main Gadget, Gamer eSports Berisiko Kena Saraf Terhimpit
Nama Media	Viva.co.id
Newstrend	Produk Asuransi Kesehatan Proteksi Gamers AIA Financial
Halaman/URL	https://www.viva.co.id/digital/digilife/1400772-kelamaan-main-gadget-gamer-esports-berisiko-kena-saraf-terhimpit
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

Kelamaan Main Gadget, Gamer eSports Berisiko Kena Saraf Terhimpit

Rabu, 1 September 2021 | 19:21 WIB

Oleh : **Lazuardhi Utama**



Gamer eSports.

SHARE



VIVA – Studi Harvard University di Amerika Serikat (AS) menyatakan kekhawatiran akan dampak dari penggunaan **gadget** atau gawai yang berlebihan, dengan ditemukannya peradangan sindrom lorong karpal atau *carpal tunnel syndrome*.

Ini adalah kondisi yang membuat tangan mengalami sensasi kesemutan, nyeri atau lemah, hingga mati rasa. Sindrom ini terjadi ketika saraf di dalam pergelangan tangan terhimpit atau tertekan, di mana salah satu penyebabnya memiliki kebiasaan memakal *gadget* secara intensif.

Industri olahraga elektronik atau **eSports** sedang berkembang di Indonesia. Dengan kisaran 44,2 juta gamer per Maret 2021, memberikan indikasi bahwa bisnis ini membutuhkan proteksi.

Iklan ditutup oleh Google

Untuk itu, perusahaan asuransi jiwa AIA berkolaborasi dengan **GoPay**, anak usaha **Gojek**, menghadirkan produk asuransi untuk para gamer bernama Proteksi Gamers di platform GoSure sebagai terobosan dalam meningkatkan penetrasi dan akses masyarakat kepada produk asuransi.

"Proteksi Gamers di platform GoSure juga menjawab kebutuhan masyarakat dan para gamer eSports seiring dengan meningkatnya penggunaan gadget yang berdampak pada kebutuhan proteksi dari risiko kesehatan yang mengintai," kata *Chief Marketing Officer* AIA, Kathryn Monika Parapak, Rabu, 1 September 2021.

Pada kesempatan yang sama, *Chief Marketing Officer* GoPay, Fibriyani Elastria, menjelaskan bahwa platform terbaru ini akan terus mengembangkan produk asuransi mikro yang dibutuhkan untuk melindungi pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak terkecuali profesi gamer eSports yang juga rentan terhadap risiko.

Iklan ditutup oleh Google

"Produk asuransi mikro menawarkan premi terjangkau, proses klaim yang sederhana, dan bisa dilakukan di aplikasi Gojek dengan pembayaran lewat GoPay yang mudah dan aman," jelas dia.

Menurut Fibriyani, Proteksi Gamers tersedia untuk masyarakat umum berusia 18-45 tahun, menawarkan premi sangat terjangkau mulai Rp16 ribu dengan manfaat perlindungan selama satu tahun terhadap risiko kesehatan jantung, mata, dan pergelangan tangan, seperti sindrom lorong karpal, dengan manfaat biaya perawatan.

Selain Proteksi Gamers, AIA telah meluncurkan perlindungan untuk *Personal Accident* dan *Cancer Insurance* melalui platform GoSure bekerja sama dengan Pasar Polis.

Produk *Personal Accident* memberikan Uang Pertanggungan hingga Rp100 juta dengan premi terjangkau mulai dari Rp25 ribu. Sedangkan, *Cancer Insurance* bisa diperoleh dengan premi mulai dari Rp15 ribu untuk perlindungan hingga Rp30 juta.

Seluruh produk asuransi AIA kolaborasi dengan GoPay dapat diperoleh dengan metode satu kali pembayaran premi atau single premium.

Judul	AIA dan Gopay Hadirkan Asuransi Bagi Para Gamers
Nama Media	Rctiplus.com
Newstrend	Produk Asuransi Kesehatan Proteksi Gamers AIA Financial
Halaman/URL	https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1505492/aia-dan-gopay-hadirkan-asuransi-bagi-para-gamers
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

AIA dan Gopay Hadirkan Asuransi Bagi Para Gamers

republika | Ekonomi | Published at 01/09/2021 22:17

[f](#) [t](#) [w](#) [L](#) [e](#)



REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- PT AIA Financial (AIA) kembali berkolaborasi dengan Gojek, *Super App* terdepan di Asia Tenggara. AIA bersama GoPay menghadirkan produk asuransi untuk gamers di fitur GoSure sebagai terobosan untuk meningkatkan penetrasi dan akses masyarakat kepada produk asuransi.

Studi dari Harvard menyatakan kekhawatiran akan dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan, dengan ditemukannya peradangan Sindrom Lorong Kapal yang menyebabkan saraf terhimpit di area pergelangan tangan pada gamers dan masyarakat umum yang memiliki kebiasaan menggunakan gadget secara intensif.

Di Indonesia, Esport telah menjadi industri yang tengah berkembang, dengan kisaran 44,2 juta pemain per Maret 2021 memberikan indikasi kebutuhan yang besar terhadap proteksi.

Chief Marketing Officer AIA, Kathryn Monika Parapak mengatakan kolaborasi AIA bersama GoPay dalam menghadirkan produk asuransi AIA di platform GoSure merupakan babak baru bagi pelaku di industri asuransi. Hal ini juga menjadi bagian penting dari pilar strategi AIA dalam memberikan layanan finansial dan program health and wellness untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik.

"Proteksi Gamers hadir untuk mengenalkan manfaat asuransi kepada kalangan muda penyuka *games* juga pelaku esports di Indonesia. Proteksi Gamers ini juga menjawab kebutuhan masyarakat seiring dengan meningkatnya penggunaan gadget berdampak pada kebutuhan proteksi dari risiko kesehatan yang mengintai," ucap dia.

Chief Marketing Officer, GoPay, Fibriyani Elastria, menjelaskan, GoPay melalui GoSure terus mengembangkan produk asuransi mikro yang dibutuhkan untuk melindungi pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak terkecuali profesi gamers yang juga rentan terhadap resiko. Produk asuransi mikro menawarkan premi terjangkau, proses klaim yang sederhana dan bisa dilakukan di aplikasi Gojek dengan pembayaran lewat GoPay yang mudah dan aman.

Proteksi Gamers tersedia untuk masyarakat umum berusia 18-45 tahun, menawarkan premi sangat terjangkau mulai Rp 16 ribu dengan manfaat perlindungan selama satu tahun terhadap risiko kesehatan jantung, mata, dan pergelangan tangan seperti Sindrom Lorong Karpal yang menyebabkan saraf terhimpit di area pergelangan tangan, dengan manfaat biaya perawatan juga Daily Hospital Cash Benefit.

Selain proteksi Gamers, AIA telah meluncurkan perlindungan untuk Personal Accident dan Cancer Insurance melalui platform GoSure bekerja sama dengan Pasar Polis. Produk Personal Accident memberikan Uang Pertanggungan hingga Rp 100 juta dengan premi terjangkau mulai dari Rp 25 ribu. Sedangkan, Cancer Insurance bisa diperoleh dengan premi mulai dari Rp 15 ribu untuk perlindungan hingga Rp30 juta. Seluruh produk asuransi AIA kolaborasi dengan GoPay dapat diperoleh dengan metode satu kali pembayaran premi atau single premium.

[Artikel Asli](#)

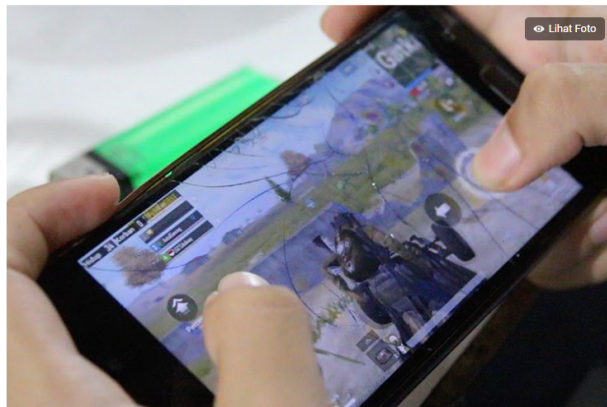
Judul	AIA dan GoPay Luncurkan Asuransi untuk Gamers, Apa Manfaatnya?
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Produk Asuransi Kesehatan Proteksi Gamers AIA Financial
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2021/09/01/103410926/aia-dan-gopay-luncurkan-asuransi-untuk-gamers-apa-manfaatnya
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

AIA dan GoPay Luncurkan Asuransi untuk Gamers, Apa Manfaatnya?

Kompas.com - 01/09/2021, 10:34 WIB

BAGIKAN:

[Komentar](#)



Ilustrasi gamers (KOMPAS.COM/ RAJA UMAR)

Penulis: Rully R. Ramli | Editor: Bambang P. Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - PT AIA Financial bekerjasama dengan Gojek, melalui GoPay, meluncurkan produk asuransi baru yang ditujukan khusus untuk gamers.

Produk ini diluncurkan untuk memfasilitasi kebutuhan proteksi masyarakat, seiring dengan terus tumbuhnya penggunaan gadget sekaligus industri e-sport di dalam negeri.

Chief Marketing Officer AIA Kathryn Monika Parapak mengatakan, hasil studi menunjukan, dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan berpotensi menimbulkan penyakit, seperti peradangan Sindrom Lorong Kapal yang menyebabkan saraf terhimpit di area pergelangan tangan.

Baca juga: 3 Tips Jitu Memaksimalkan Asuransi untuk Investasi

"Proteksi Gamers ini juga menjawab kebutuhan masyarakat seiring dengan meningkatnya penggunaan gadget berdampak pada kebutuhan proteksi dari risiko kesehatan yang mengintai," tutur dia, dalam keterangannya, Rabu (1/9/2021).

Lebih lanjut ia menyebutkan, kolaborasi dengan GoPay dalam menghadirkan produk asuransi AIA dalam platform GoSure juga merupakan usaha perusahaan untuk terus meningkatkan penetrasi dan akses masyarakat kepada produk asuransi.

"Hal ini juga menjadi bagian penting dari pilar strategi AIA dalam memberikan layanan finansial dan program health and wellness untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan *insight* di email kamu.
[Daftarkan email](#)

Chief Marketing Officer GoPay Fibriyani Elastria menjelaskan, proteksi gamers tersedia untuk masyarakat umum berusia 18-45 tahun, dengan menawarkan premi mulai dari Rp16.000.

Adapun manfaat produk tersebut ialah perlindungan selama satu tahun terhadap risiko kesehatan jantung, mata, dan pergelangan tangan seperti Sindrom Lorong Karpal yang menyebabkan saraf terhimpit di area pergelangan tangan, dengan manfaat biaya perawatan juga Daily Hospital Cash Benefit.

"GoPay melalui GoSure terus mengembangkan produk asuransi mikro yang dibutuhkan untuk melindungi pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak terkecuali profesi gamers yang juga rentan terhadap risiko," kata Fibriyani.

BECOME A GLOBAL
in supply chain & purchasing

[LEARN MORE](#)

INTERNATIONAL
PROGRAMME



Audencia
international.audencia.co

TERPOPULER

- 1 Bantuan PKH Cair Bu Cek Penerima di cekbansos.kemensos
Dibaca 43.463 kali
- 2 Cara Mencairkan Seb Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan
Dibaca 34.314 kali
- 3 Segera Cetak Namet Kartu Ujian CPNS Ker Terakhir Hari Ini
Dibaca 13.548 kali
- 4 Segera Cek, Pengum Kartu Prakerja Gelom Keluar Hari Ini
Dibaca 12.321 kali
- 5 Mau Ajukan KUR BNI Modal Usaha? Simak

Judul	AIA dan Gojek Rilis Asuransi Kesehatan Khusus Gamers di Indonesia
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Produk Asuransi Kesehatan Proteksi Gamers AIA Financial
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20210901/215/1436460/aia-dan-gojek-rilis-asuransi-kesehatan-khusus-gamers-di-indonesia
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

AIA dan Gojek Rilis Asuransi Kesehatan Khusus Gamers di Indonesia

Proteksi Gamers beresda untuk masyarakat umum berusia 18-45 tahun, menawarkan premi sangat terjangkau mulai Rp16 ribu dengan manfaat perlindungan selama satu tahun terhadap risiko kesehatan jantung, mata, dan pergelangan tangan seperti Sindrom Lorum Karpal.

Hidjeh Aisyah - Bisnis.com
11 September 2021 | 09:38 WIB



AIA Financial membuat memberikan perlindungan berupa asuransi yang terjangkau serta cover dari biaya pengobatan akibat kiam tendon - rotator

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa PT AIA Financial kembali berkolaborasi dengan GoPay, untuk pembayaran bagian dari aplikasi Gojek, untuk menghadirkan produk asuransi untuk gamers di fitur GoSure sebagai terdosisan untuk meningkatkan penetrasi dan akses masyarakat kepada produk asuransi.

Studi dari Harvard mengungkapkan dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan, dengan diikutinya peradangan Sindrom Lorum Karpal yang menyebabkan saraf tertimpit di area pergelangan tangan pada gamers dan masyarakat umum yang memiliki kebiasaan menggunakan gadget secara intensif.

Sementara itu, e-sport di Tanah Air telah menjadi industri yang tengah berkembang, dengan kasar 44,2 juta pemain per Maret 2021. Hal ini membentarkan indikasi kebutuhan yang besar terhadap proteksi.

Baca Juga : AIA Bukukan Premi Rp13,5 Triliun, Naik 3,5 Persen sepanjang 2020

Chief Marketing Officer AIA, Kathryn Monika Parapak mengatakan kolaborasi AIA bersama GoPay dalam menghadirkan produk asuransi AIA di platform GoSure merupakan babak baru bagi pelaku di industri asuransi.



"Hal ini juga menjadi bagian penting dari pilar strategi AIA dalam memberikan layanan finansial dan program health and wellness untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik" paparnya dalam siaran pers. Selasa (30/1/2021).

Kathryn menambahkan proteksi Gamers hadir untuk mengenalkan manfaat asuransi kepada kalangan muda penikmat games juga pelaku esports di Indonesia.

Baca Juga : Tajir Melintir, Kekayaan Bos Induk Shopee Forrest LI Tembus Rp284 Triliun

"Proteksi Gamers ini juga menjawab kebutuhan masyarakat seiring dengan meningkatnya penggunaan gadget berdampak pada kebutuhan proteksi dari risiko kesehatan yang mengintai."



Asuransi Rencan Ciputra Life
Perlindungan yang memberikan rasa Aman tanpa beban dengan premi terjangkau
Ciputra Life [Pelajar >](#)

Chief Marketing Officer GoPay Fitriyeni Electria, menjelaskan GoPay melalui GoSure terus mengembangkan produk asuransi mikro yang dibutuhkan untuk melindungi pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak terkecuali profesi gamers yang juga rentan terhadap risiko.

Produk asuransi mikro menawarkan premi terjangkau, proses klaim yang sederhana dan bisa dilakukan di aplikasi Gojek dengan pembayaran lewat GoPay yang mudah dan aman.

Proteksi gamers beresda untuk masyarakat umum berusia 18-45 tahun, menawarkan premi sangat terjangkau mulai Rp16 ribu dengan manfaat perlindungan selama satu tahun terhadap risiko kesehatan jantung, mata, dan pergelangan tangan seperti Sindrom Lorum Karpal yang menyebabkan saraf tertimpit di area pergelangan tangan, dengan manfaat biaya perawatan juga Daily Hospital Cash Benefit.

Selain proteksi gamers, AIA telah meluncurkan perlindungan untuk Personal Accident dan Cancer Insurance melalui platform GoSure bekerja sama dengan Pasar Polis.

Produk Personal Accident memberikan Uang Perlindungan hingga Rp100 juta dengan premi terjangkau mulai dari Rp25.000. Sedangkan, Cancer Insurance bisa diperoleh dengan premi mulai dari Rp15.000 untuk perlindungan hingga Rp30.000.

Seluruh produk asuransi AIA kolaborasi dengan GoPay dapat diperoleh dengan metode satu kali pembayaran premi atau single premium.

Judul	Dampak PPKM, Pembatalan Polis Asuransi Meningkat
Nama Media	Kontan
Newstrend	Kinerja Produk Unitlink Semester I/2021
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2021-09-02
Sentimen	Netral

■ ASURANSI JIWA

Dampak PPKM, Pembatalan Polis Asuransi Meningkat

JAKARTA. Kebutuhan dana masyarakat semakin tinggi di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari pembatalan polis sebelum waktunya meningkat atau nilai tebus (*surrender*) pada industri asuransi jiwa meningkat.

Alhasil, penarikan dana tunai menunjukkan tren kenaikan. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), mencatat klaim *surrender* industri asuransi jiwa naik 30,6% *year on year* (yoy) menjadi Rp 28,54 triliun pada kuartal pertama 2021.

Penarikan sebagian dana investasi (*partial withdrawal*) juga naik. Pada periode yang sama, klaim *partial withdrawal* naik hingga 53,1% yoy dari Rp 4,05 triliun menjadi Rp 6,2 triliun.

Perencana keuangan, Ahmad Gozali mengatakan, penarikan dana tunai dari polis unitlink merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana segar. Khususnya bagi nasabah yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki aset likuid.

Sebelum menarik dana mereka, ia meminta nasabah

berpikir matang. Jika nasabah masih memiliki saldo investasi unitlink yang mencukupi, mereka masih bisa melanjutkan polisnya. "Artinya, mereka mendapatkan uang segar dan polis juga tetap berlaku," kata Gozali, Rabu (1/9).

Oleh karena itu, dana yang ditarik harus lebih rendah dibandingkan saldo investasi. Jika semua dana ditarik, maka masa waktu polis berakhir karena premi asuransi tidak dapat dibayarkan dari saldo yang ada.

"Ada baiknya, berkonsultasi dulu dengan pihak asuransi

untuk mendapatkan kejelasan berapa saldo mereka saat ini. Berapa dana yang ditarik dan apa konsekuensinya," jelas dia.

Setelah berkonsultasi, nasabah harus mempertimbangkan dua hal yakni kelanjutan polis proteksi serta untung rugi investasi (NAB) unitlink. Terkait untung rugi investasi, dihitung berdasarkan selisih NAB saat setor premi dan NAB ketika tarik dana kemudian dikurangi biaya - biaya lain.

"Kalau NAB sedang tinggi, berarti lumayan karena biasa-

nya investasi sudah memberikan keuntungan. Namun jika NAB sedang rendah, bisa jadi nasabah rugi dalam berinvestasi," ungkapnya.

Direktur Keuangan BNI Life, Eben Eser Nainggolan pernah menjelaskan, pendapatan premi BNI Life menurun pada Juli 2021. Salah satunya dipengaruhi beberapa nasabah yang ajukan *surrender*. Pendapatan premi produk unitlink BNI Life mencapai Rp 867 miliar sampai Juli 2021 kemarin.

Ferrika S, Adrianus O

Judul	Butuh dana segar? Begini tips tarik dana unitlink
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Edukasi Nasabah Produk Unitlink
Halaman/URL	https://personalfinance.kontan.co.id/news/butuh-dana-segar-begini-tips-tarik-dana-unitlink
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

Judul	ALLIANZ Tingkatkan Asuransi Syariah Melalui Fitur Wakaf
Nama Media	Majalah Mix
Newstrend	Produk Asuransi Jiwa Syariah AlliSya Protection
Halaman/URL	8
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

 TREND

Allianz Tingkatkan Asuransi Syariah Melalui Fitur Wakaf



harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Lembaga pengelola wakaf ini memiliki tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai amanah,

Fitur Wakaf menjadi salah satu tools yang digunakan Allianz untuk memberikan pemahaman tentang asuransi syariah. Oleh karena itu, pada 2019 lalu, Allianz Life Syariah meluncurkan fitur Wakaf pada produk asuransi jiwa unit link AlliSya Protection Plus.

"Allianz Life Syariah memiliki komitmen untuk mengajak masyarakat berbagi kebaikan, salah satunya melalui fitur wakaf pada manfaat asuransi syariah. Fitur ini sangat sejalan dengan prinsip saling menolong dalam asuransi syariah," ungkap Yoga Prasetyo, Pimpinan Unit Usaha Syariah Allianz Life Indonesia, pada Allianz Indonesia Media Workshop bertajuk "Hengas Wakaf pada Manfaat Asuransi Syariah" yang digelar awal Agustus ini (3/8) secara virtual.

Medupun manfaat wakaf sangat luas, dituturkan Yoga, pemahaman terkait wakaf masih tergolong rendah. "Untuk itu, kami terus melakukan edukasi tentang wakaf kepada masyarakat serta bekerja sama dengan Lembaga Nisrah. Kami meyakini apapun yang diawali dengan kebaikan dan diakhiri dengan kebaikan, akan memberikan manfaat bagi banyak orang," yakinnya.

Sementara itu, menuju pada Outlook Persewaan Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan Indonesia memiliki potensi wakaf yang mencapai Rp 180 triliun per tahun. Sayangnya, jumlah akumulatif wakaf per Januari 2021 masih tergolong rendah, yaitu mencapai Rp 89,36 miliar. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi mengenai wakaf, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf.

Lantas, bagaimana potensi wakaf di Allianz? Dijawab Hendra Gunawan, Head of Sharia Marketing & Business Support Allianz Life Indonesia, sejak Fitur Wakaf diluncurkan pada 2019 lalu, peserta asuransi syariah di Allianz sudah mencapai 94.800 orang. Sementara itu, potensi peserta wakaf mencapai 298 peserta. Dan, sampai 30 Juni 2021, potensi wakaf di Allianz mencapai lebih dari Rp 24,8 miliar. "Consumer survey yang kami lakukan mencatat bahwa baru 4% dari peserta yang bergabung dengan Fitur Wakaf. Untuk itu, kami akan gencar mengedukasi Fitur Wakaf ini," ucapnya.

Dalam pengelolaan wakaf, Allianz bekerja sama dengan lembaga pengelola wakaf (Nisrah) yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu Domipat Dhuafa, Insistif Wakaf (I-wakaf), Rumah Wakaf Indonesia, serta Wakaf Al-Azhar, yang menerima

mengasasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Mohamad Yusuf, Direktur I-wakaf, menjelaskan, "Sebagai lembaga Nisrah, kami terus berkomitmen untuk dapat mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai amanah dan syaria. Kami mendukung penuh inisiatif dari Allianz Life Syariah untuk mengembangkan wakaf melalui asuransi yang juga dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas."

Lebih jauh ia menjelaskan, dana yang terkumpul kemudian dari fitur wakaf akan dikelola oleh lembaga pengelola wakaf (Nisrah) dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Salah satu manfaat dari wakaf lewat asuransi ini telah diwujudkan sebelumnya oleh sebagian masyarakat melalui penyaluran wakaf pada beberapa program yang dikelola oleh I-wakaf. Antara lain, Wakaf Uang, Wakaf Produktif berupa Boycing School, dan Wakaf Proyek berupa Sumur Wakaf," pungkas Yusuf, yang menyebutkan bahwa wakaf proyek masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia. (Dwi)

8 >< Agustus - September 2021

Judul	IFG Cari Cara Galang Pendanaan
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2021-09-02
Sentimen	Netral

| RESTRUKTURISASI POLIS ASURANSI JIWASRAYA |

IFG Cari Cara Galang Pendanaan

Bisnis, JAKARTA — Indonesia Financial Group atau IFG bakal mencari cara menggalang dana guna menyelesaikan proses restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang masih menjadi tanggung jawab perusahaan itu.

Wakil Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko mengatakan bahwa berdasarkan koordinasi bersama pemerintah, perseroan belum mendapatkan alokasi dana penyertaan modal negara (PMN) pada tahun anggaran 2022.

"Kami mendapat informasi dari rapat Kemenkeu dan DJKN [Direktorat Jenderal Kekayaan Negara] bahwa tahun anggaran 2022 untuk BPUI

tidak ada alokasi PMN," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (1/9).

IFG berada dalam *holding* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang menjadi payung bisnis perusahaan asuransi dan penjaminan.

Sebelumnya IFG bersama pemerintah merumuskan adanya dukungan PMN Rp22 triliun dari total keperluan restrukturisasi Jiwasraya sebesar Rp26,7 triliun.

Sebesar Rp20 triliun dialokasikan pada PMN pada 2021, sementara itu senilai Rp2 triliun dari rencana penyertaan modal pada anggaran tahun depan. Sementara, sisanya

Rp4,7 triliun bersumber dari penggalangan dana dengan *underlying* dividen anak perusahaan selama 5 tahun ke depan.

Setelah skenario itu berjalan dan restrukturisasi polis Jiwasraya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) rampung, harapannya kesehatan keuangan lebih terjaga dengan *risk-based capital* (RBC) 120%.

Akan tetapi, dengan tidak adanya PMN pada tahun depan, pihaknya perlu mengganti rencana untuk menambah porsi penggalangan dana internal menjadi Rp6,7 triliun.

"Tapi mencari upaya sendiri sebesar Rp6,7 triliun ini tentu membawa kon-

sekuensi finansial bagi BPUI, karena *leverage*-nya sangat ketat, sudah *stretch* [ketat] sekali. Ini akan memengaruhi fleksibilitas BPUI dalam tugas menjalankan dan mengembangkan perusahaan asuransi," katanya..

Hexana menambahkan di samping itu, langkah ini pun memerlukan relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena sesuai ketentuan dasar, penambahan modal tidak boleh bersumber dari utang.

Adapun, berkaitan transfer portofolio Jiwasraya ke IFG Life, Hexana mengungkapkan kesiapan legal, *compliance*, audit polis, operasional, produk, dan infrastruktur masih terjaga. Apabila

PNM tahun ini cair per September 2021, transfer portofolio bisa digelar pada Oktober 2021.

Dalam rapat Juli lalu di DPR, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan tambahan PMN senilai Rp2 triliun pada 2022 dalam rangka restrukturisasi polis Asuransi Jiwasraya.

Selain PMN, terdapat sumber dana lain untuk membantu penyelesaian masalah keuangan Jiwasraya. Di antaranya adalah penerbitan surat utang oleh IFG senilai Rp2 triliun yang akan diserap oleh PT Taspen (Persero) dengan tenor 2 tahun.

(Aziz Rahardyan)

Judul	Jangan Asal Pilih Produk Asuransi
Nama Media	Medcom.id
Newstrend	Produk Unitlink MiSmart Insurance Solution
Halaman/URL	https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/nN943ORK-jangan-asal-pilih-produk-asuransi
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

HOME — EKONOMI — KEUANGAN



Chief Agency Officer Manulife Indonesia Jeffrey Kie (Foto: Dok. Manulife Indonesia)

Jangan Asal Pilih Produk Asuransi

Ekonomi Asuransi Manulife

Gervin Nathaniel Purba - 01 September 2021 13:14

Jakarta: Asuransi pada umumnya memberikan manfaat dalam membantu nasabah agar terhindar dari kerugian finansial. Dalam menawarkan manfaat sesuai kebutuhan, asuransi terbagi dalam beberapa jenis.

Jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia yakni asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi dana henti tua, dan asuransi umum. Masing-masing dari jenis asuransi tersebut biasanya memiliki produk unggulan untuk menarik minat nasabah.

Selatan memilih, tentunya setiap nasabah sudah mempertimbangkan apa yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan profil keuangannya. Begitu juga dalam memilih besaran biaya premi.

Namun bagaimana jika ternyata nasabah salah memilih? Terlebih baru disadarinya setelah berjalan lebih dari dua tahun. Chief Agency Officer Manulife Indonesia Jeffrey Kie memberikan penjelasan terkait hal ini.



Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Happy Inspire Continue Sad

1. Bisa Segera Diubah

Pada dasarnya nasabah sudah diberikan penjelasan secara terperinci oleh para agen asuransi mengenai keunggulan dan kelebihan produk asuransi. Namun tidak sedikit yang merasa tidak cocok dengan kebutuhan ketika sudah menjalaninya.

Nasabah, kata Jeffrey Kie, masih bisa mengubahnya selama belum berjalan dalam periode waktu yang lama. Tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.

2. Sebaliknya Tetap Dilarutkan

Dengan menggunakan asuransi, nasabah sudah memiliki kasudiran untuk menabung. Namun jika ternyata instrumen yang dipilih tidak sesuai dan sudah berjalan selama tiga atau empat tahun, Jeffrey menyarankan sebaliknya tetap dilanjutkan.

"Menurut saya tidak ada salahnya untuk tetap menabung. Paling tidak Anda sudah menyalurkan uang untuk tabungan. Bayangkan jika tiga tahun yang lalu kita tidak menggunakan asuransi, uang yang kita kumpulkan akan tetap habis juga," kata Jeffrey, dalam program Do It Metro TV, Seaks, 31 Agustus 2021.

3. Konsultasikan dengan Agen yang Tepat

Pada saat tertentu, setiap orang memang harus memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk menentukan mana produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan profil keuangan, segera konsultasikan dengan agen asuransi.

Jeffrey mengingatkan kepada setiap orang untuk memilih agen asuransi yang tepat dan berkompeten. Seorang agen asuransi bisa meyakinkan kepada nasabah bahwa dirinya merupakan agen yang aktif dan terpelajar dengan menunjukkan bukti yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Tidak ada salahnya jika bertemu agen asuransi menanyakannya untuk menunjukkan kartu lisensinya. Harus bisa ditunjukkan. Kedua, agen harus memiliki pengetahuan produk yang baik," kata Jeffrey.

Jika Anda sedang mencari produk asuransi yang memiliki manfaat yang lengkap, Manulife Indonesia meluncurkan sebuah produk baru bernama MiSmart Insurance Solution (Mission). Mission dirancang untuk memberikan perlindungan jika sekaligus investasi.

Menurut Jeffrey, Mission merupakan produk asuransi yang bisa mengangkai seluruh lapisan masyarakat. Preminya terjangkau, hanya Rp4 juta per tahun. Instrumen investasi yang ditawarkan juga bisa disesuaikan dengan profil keuangan nasabah.

"Ada yang agresif, konvensional, dan moderat. Itu tergantung kita," ujar Jeffrey.

Dengan menggunakan Mission, nasabah akan mendapatkan perlindungan jika umur hidup hingga 110 tahun. Selain itu, ada manfaat buyback yang akan diberikan pada tahun ke-10 dan ke-25. Nasabah yang loyal menggunakan Mission akan mendapatkan tambahan asuransi kesehatan.

"Produk ini menyajikan generasi milenial. Kami sasar generasi milenial ini untuk membantu mereka mengatur keuangan mereka sejak dini," ujarnya.

Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Mission, dapat dilihat [di sini](#).

Judul	Seperti Ini Tren Pencarian Asuransi di Search Engine
Nama Media	Marketing.co.id
Newstrend	Trend Pencarian Asuransi Jiwa & Kesehatan
Halaman/URL	https://marketing.co.id/seperti-ini-tren-pencarian-asuransi-di-search-engine/
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

Seperti Ini Tren Pencarian Asuransi di Search Engine

By Cecep Supriadi

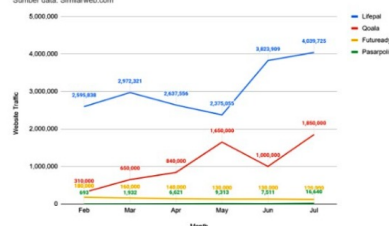
Posted on 1 September 2021

Marketing.co.id – Berita Finansial | Pandemi Covid-19 sudah berlangsung dua tahun dan masih jauh dari kata usai. Kondisi tersebut memberikan kontribusi pada perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam berselancar.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan *Lifepal.co.id*, kunjungan ke situs-situs broker asuransi di kuartal I dan II 2021 menunjukkan perubahan, ada yang naik, stabil maupun turun. Lifepal melakukan riset data trafik terhadap sejumlah situs broker asuransi dan tren pencarian asuransi periode yang sama, yaitu pada kuartal I dan II 2021.

Website Traffic Broker Asuransi di Indonesia 2021

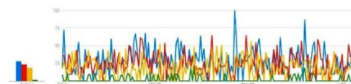
Sumber data: Similarweb.com



Untuk menganalisis data trafik situs broker asuransi *online*, Lifepal menggunakan data *traffic* dari empat broker asuransi di Indonesia sebagai sampel, yaitu Lifepal.co.id, Futuready.com, Qoala.com, dan Pasarpolis.com. Tepat pada Februari 2021, total trafik dari empat situs broker asuransi *online* mencapai 3,2 juta. Dan, terjadi kenaikan trafik signifikan sebesar 88% di bulan Juli 2021, yaitu dari 3,2 juta melesat ke 6,02 juta.

Seperti diketahui, di Juni 2021, terjadi kenaikan trafik yang cukup signifikan, yaitu sebesar 53% dari Februari 2021. Kondisi itu turut memberikan andil untuk mendorong kenaikan trafik di bulan Juli 2021.

Selain data trafik situs broker asuransi *online*, Lifepal memperoleh data menarik mengenai tren pencarian kata kunci asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, dan unit link di Google pada bulan Februari hingga Juli 2021.



***Biru: asuransi kesehatan, merah: asuransi jiwa, kuning: asuransi mobil, hijau: unit link**

Dari tren pencarian tersebut, asuransi kesehatan menjadi kata kunci yang paling stabil. Tak hanya itu saja, dari tren pencarian terungkap, bahwa asuransi kesehatan dan asuransi jiwa terlihat saling menyalipl satu sama lain.

Meski kata kunci asuransi kesehatan mengalami kenaikan jumlah pencarian yang cukup tinggi pada bulan Mei dan Juli di mana terdapat grafik yang *spike* (runcing) cukup tinggi, terjadi penurunan di pekan ketiga bulan Mei dan pekan pertama bulan Juli.

Untuk kata kunci asuransi jiwa, tren pencariannya mengalami kenaikan di Mei awal hingga akhir bulan. Kondisi tersebut juga terjadi pada bulan Juli seperti pada akhir Maret 2021.

Tren pencarian kata kunci "asuransi mobil" juga mengalami kenaikan di awal April dan akhir Mei 2021. Angka kenaikan pencarian kata kunci itu sudah stabil di pertengahan April hingga awal Mei.

Tren pencarian "asuransi mobil" bisa dikatakan unik, karena terlihat meningkat drastis di awal April dan akhir Mei 2021. Lonjakan pencarian tersebut terjadi di pekan ke-3 bulan Mei, sementara di pertengahan April hingga awal Mei angka kenaikan pencarian kata kunci itu sudah stabil.

Sama seperti di tahun sebelumnya, Unit Link tetap menjadi asuransi dengan jumlah pencarian terkecil, namun grafik tren pencarian unit link justru terlihat mengalami kenaikan sejak April hingga Juni 2021.

Dari 29 provinsi, tren pencarian kata kunci asuransi kesehatan tertinggi adalah Sulawesi Tenggara, dan terendah yaitu Sumatera Selatan. Untuk tren pencarian kata kunci asuransi jiwa tertinggi adalah Kalimantan Selatan, terendah yaitu Maluku. Tren pencarian kata kunci asuransi mobil tertinggi yaitu Kalimantan Tengah, dan terendah di Maluku. Sedangkan untuk tren pencarian kata kunci unit link tertinggi adalah Sumatera Utara, dan terendah yaitu Maluku.

Sekadar diketahui, data ini hanya menunjukkan tingginya pencarian dengan menggunakan kata kunci, bukan berarti menjamin tingginya permintaan atau pembelian asuransi tersebut. Meski tren pencarian Unit Link naik, volume pencariannya masih jauh di bawah pencarian asuransi kesehatan dan asuransi jiwa.

Sebab, banyak sekali kanal distribusi produk asuransi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk membeli asuransi, sebut saja melalui agen-agen asuransi yang aktif menawarkan produknya kepada calon nasabah, perbankan, dan lainnya.

Judul	Pengamat: Perombakan Pengurus Dapat Selamatkan Asuransi Bumiputera
Nama Media	Infobanknews.com
Newstrend	Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera
Halaman/URL	https://infobanknews.com/topnews/pengamat-perombakan-pengurus-dapat-selamatkan-asuransi-bumiputera/
Tanggal Berita	2021-08-31
Sentimen	Netral

Pengamat: Perombakan Pengurus Dapat Selamatkan Asuransi Bumiputera

By *Evan Yulian* on 31/08/2021 · No Comment



Jakarta – Persoalan gagal bayar yang menimpa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) tak kunjung menemui titik terang. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, langkah awal yang harus dilakukan ialah merombak pengurus dan pengelola AJBB yakni Badan Perwakilan Anggota (BPA) dengan yang lebih profesional.

“Kita berharap besok Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan panitia pembentukan BPA. Karena tanpa itu (BPA), kita akan terus menunggu penyelesaian persoalan di Bumiputera ini tidak selesai-selesai,” katanya, dalam sebuah webinar, Selasa, 31 Agustus 2021.

Karena, lanjut Piter, dengan adanya BPA dan pengurusnya yang baru, bisa menjadikan Bumiputera sebagai perusahaan yang sehat dan menguntungkan kembali. Dan itulah satu-satunya jalan agar nasabah bisa memperoleh uangnya kembali.

Selain itu, ia juga menilai pentingnya peranan dari lembaga penjamin polis untuk melindungi nasabah asuransi. Oleh karena itu, Piter berharap agar pemerintah segera membentuk Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP).

“Kalau dibiarkan terus, berbagai kasus terjadi dan benar-benar kehilangan kepercayaan (masyarakat), industri asuransi nggak bisa tumbuh dengan baik. Padahal, industri asuransi ini di berbagai dunia memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor keuangan di setiap negara,” katanya. (*) Bagus Kasanjanu

Judul	Dorong Penyelesaian Kasus AJBB
Nama Media	Padang Ekspres
Newstrend	Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera
Halaman/URL	3
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

Dorong Penyelesaian Kasus AJBB

OJK Hanya Bisa Membantu dan Memfasilitasi

Jakarta, Padek—Industri asuransi Indonesia tengah dilanda banyak permasalahan yang berpotensi menghancurkan kepercayaan ma-

syarakat. Hal ini bisa menimbulkan dampak yang sangat besar karena kepercayaan masyarakat merupakan jantungnya industri asuransi.

"Seperti permasalahan gagal bayar yang terjadi di perusahaan asuransi besar seperti Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) harus segera diselesaikan untuk menyelamatkan industri asuransi," ujar Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam.

Berbeda dengan Jiwasraya, AJBB adalah perusahaan swasta murni dengan bentuk badan hukum usaha bersama. Pemilik polis adalah pemilik AJBB sehingga ketika perusahaan mengalami kerugian seluruh pemilik polis harus menanggung kerugian tersebut. Dalam hal

ini pemilik polis tidak bisa berharap pemerintah menalangi (bail out) seluruh kerugian AJBB," tuturnya.

Disisi lain, pemilik polis juga tidak bisa menyalahkan regulator karena berlarut-larutnya permasalahan di AJBB. Sebab, kunci penyelesaian permasalahan AJBB

ada di pengelola AJBB. "Regulator, dalam hal ini OJK, hanya bisa membantu dan memfasilitasi," tegasnya.

Sejak 1997, saat permasalahan AJBB pertama kali muncul, regulator saat itu (Kementerian Keuangan) sudah berusaha memfasilitasi penyelesaian permasalahan di AJBB. Saat itu regulator meminta AJBB untuk menyusun program penyehatan jangka pendek dan menengah. Regulator juga sudah mengingatkan agar Badan Perwakilan Anggota (BPA) independen dan tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan AJBB.

Setelah itu Regulator tidak pernah berhenti berupaya memfasilitasi penyelesaian permasalahan AJBB. Sejak 1997 hingga sekarang regulator setidaknya sudah tiga kali menghadapi opsi melikuidasi atau melanjutkan upaya penyehatan AJBB. Tiga kali pula regulator memilih untuk menyelamatkan AJBB.

"Permasalahan AJBB tidak pernah selesai tuntas karena pengelola AJBB (BPA, komisaris dan direksi) tidak pernah konsisten melaksanakan program-program yang mereka susun sendiri," ungkapnya.

Belajar dari fakta bahwa gagalnya program penyehatan AJBB selama ini lebih disebabkan oleh intervensi BPA, regulator saat ini yakni OJK mencoba untuk lebih tegas dengan mengeluarkan empat kali perintah tertulis kepada AJBB yang isinya meminta BPA untuk lebih independen, tidak mencampuri pengelolaan AJBB, serta segera mengambil tindakan mengakui kerugian yang dialami AJBB.

"Surat perintah tertulis dari OJK menjadi awal 'pembangkangan' BPA terhadap OJK. BPA kemudian tidak memberikan dukungan yang cukup terhadap upaya-upaya penyehatan keuangan AJBB. Akibatnya seluruh program penyelesaian AJBB gagal," tuturnya.

Pembangkangan terbesar BPA adalah ketika OJK mengeluarkan perintah tertulis (yang keempat) melalui surat No. S-13/D.05/2020 tanggal 16

April 2020. Isi perintah tertulis tersebut adalah meminta AJBB untuk segera melaksanakan Sidang Luar Biasa BPA/RUA guna mengambil keputusan terkait kerugian yang dialami AJBB sebagaimana diatur dalam pasal 38 Anggaran Dasar AJBB.

Pembangkangan BPA diwujudkan dalam bentuk gugatan judicial review terhadap UU No.40 tahun 2014 yang kemudian berdampak kepada PP No.87 tahun 2019 yang mengatur tentang badan usaha milik bersama.

Permohonan judicial review tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus menggugurkan PP No.87 tahun 2019. Selanjutnya ketentuan tentang usaha perasuransian berbentuk usaha bersama harus diatur lebih lanjut dengan UU sendiri.

Pasca keputusan MK terjadi kekosongan BPA di AJBB. Sesuai masa tugasnya kepengurusan Anggota BPA berakhir per 26 Desember 2020. Tetapi tidak bisa segera berganti karena tidak adanya payung hukum tentang bagaimana pergantian BPA dilakukan.

"Untuk mengatasi permasalahan kekosongan BPA ini OJK memfasilitasi pertemuan antara manajemen AJBB dengan perwakilan beberapa perkumpulan pempol, asosiasi agen, dan SP NIBA, pada 16 Maret 2021," sebutnya.

Dalam pertemuan tersebut disepakati antara lain direksi akan mengajukan penetapan Panitia Pemilihan BPA melalui Pengadilan. Keputusan pengadilan terkait panitia pemilihan BPA ini akan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 September 2021.

Menurut Piter, OJK selaku regulator sudah berupaya melaksanakan tugasnya untuk menyelamatkan AJBB secara maksimal. "Peran OJK memang hanya sebatas mengarahkan dan memfasilitasi. Sementara keberhasilan penyelesaian permasalahan di AJBB lebih ditentukan oleh BPA dan manajemen (komisaris dan direksi) AJBB," jelasnya. (arm/jpg)

Judul	OJK Dorong Penyelesaian Kasus Asuransi BUMIPUTERA
Nama Media	Radar Bogor
Newstrend	Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera
Halaman/URL	2
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

OJK Dorong Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera

JAKARTA-Industri asuransi Indonesia tengah dilanda banyak permasalahan yang berpotensi menghancurkan kepercayaan masyarakat.

Hal ini bisa menimbulkan dampak yang sangat besar karena kepercayaan masyarakat merupakan jantungnya industri asuransi. "Seperti permasalahan gagal bayar yang terjadi di perusahaan asuransi besar seperti Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) harus segera diselesaikan untuk menyelamatkan industri asuransi," ujar Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam.

Berbeda dengan Jiwasraya, AJBB adalah perusahaan swasta murni dengan bentuk badan hukum usaha bersama. Pemilik polis adalah pemilik AJBB sehingga ketika perusahaan mengalami kerugian seluruh pemilik polis harus menanggung kerugian tersebut. "Dalam hal ini pemilik polis tidak bisa berharap pemerintah menalangi (bail out) seluruh kerugian AJBB," tuturnya.

Disisi lain, pemilik polis juga tidak bisa menyalahkan regulator karena berlarut-larutnya permasalahan di AJBB. Sebab, kunci penyelesaian permasalahan AJBB ada di pengelola



OJK: Otoritas Jasa Keuangan mendorong penyelesaian kasus asuransi Bumiputera.

AJBB. "Regulator, dalam hal ini OJK, hanya bisa membantu dan memfasilitasi," tegasnya.

Sejak 1997, saat permasalahan AJBB pertama kali muncul, regulator saat itu (Kementerian Keuangan) sudah berusaha memfasilitasi penyelesaian permasalahan di AJBB. Saat itu regulator meminta AJBB untuk menyusun program penyesuaian jangka pendek dan menengah. Regulator juga sudah mengingatkan agar Badan Perwakilan Anggota (BPA) independen dan tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan AJBB.

Setelah itu Regulator tidak pernah berhenti berupaya memfasilitasi penyelesaian permasalahan AJBB. Sejak

1997 hingga sekarang regulator setidaknya sudah tiga kali menghadapi opsi melikuidasi atau melanjutkan upaya penyesuaian AJBB. Tiga kali pula regulator memilih untuk menyelamatkan AJBB.

"Permasalahan AJBB tidak pernah selesai tuntas karena pengelola AJBB (BPA, komisaris dan direksi) tidak pernah konsisten melaksanakan program-program yang mereka susun sendiri," ungkapnya.

Belajar dari fakta bahwa gagalnya program penyesuaian AJBB selama ini lebih disebabkan oleh intervensi BPA, regulator saat ini yakni OJK mencoba untuk lebih tegas dengan mengeluarkan empat kali perintah tertulis. (jp)

Judul	Darurat Perlindungan Data Pribadi
Nama Media	Suara Merdeka
Newstrend	RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
Halaman/URL	1 & 7
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

Darurat Perlindungan Data Pribadi

DATA DIRI:
Forum Legislasi
bertema
"Nasib RUU
Perlindungan
Data Pribadi"
di Media Center
DPR RI, Senayan,
Jakarta, Selasa
(31/8). (24)

Keamanan Penyimpanan Perlu Diperkuat

JAKARTA - Kebocoran data pribadi yang terus terjadi di berbagai lembaga, baik swasta maupun pemerintah sudah sangat memprihatinkan. Bahkan dapat dikatakan, Indonesia darurat perlindungan data pribadi.

Anggota Komisi I DPR M Farhan kemarin mengatakan, kondisi kebocoran data pribadi ini bukan hanya krusial dan kritis, melainkan sudah sangat darurat. Terlebih, setiap minggu ada berita kebocoran data pribadi.

"Awalnya kebocoran dari pihak swasta. Akan tetapi ketika BRI Life yang bocor, kemudian bocor juga data BPJS Kesehatan, apalagi juga ada berita data Kementerian Kesehatan bocor. Ini sangat mengkhawatirkan," tandas Farhan dalam diskusi

Forum Legislasi "Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8).

Perlu Otoritas

Solusi yang paling pas sekarang, menurutnya, menggunakan UU ITE yang ujungnya pemidanaan. Sebab, dasar hukum inilah yang kini tersedia. Meski demikian, UU ITE diterapkan dalam kasus BRI Life dan BPJS Kesehatan akan berujung pada pencabutan penyelenggaraan sistem elektronik kedua lembaga tersebut. Dampaknya, layanan jaminan sosial terhadap jutaan orang

bakal terganggu, bahkan tak terlayani.

Karena itu, dalam RUU PDP, harus ada otoritas perlindungan data. "Dan yang menarik di RUU PDP, tidak ada kriminalisasi, namun akan ada denda yang sangat besar," ungkapnya.

Jika semua sepakat untuk membangun lembaga independen di bawah presiden untuk perlindungan data, lanjutnya, maka harus ada komitmen kuat untuk perlindungan data pribadi. Minimal, posisinya selaku

Komisi Pemberantasan Korupsi secara politik atau setara Otoritas Jasa Keuangan secara anggaran. "Kebocoran data pribadi sudah sangat darurat. Kita butuh lembaga yang langsung kerja. Hari ini ketuk UU dan besok langsung kerja," imbuhnya.

(Bersambung
hlm 7 kol 1)



SM/Saktia Andri Susilo



Darurat...

(Sambungan hlm 1)

Kebocoran data pribadi yang sangat mengkhawatirkan juga diungkapkan anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal dalam diskusi tersebut. Iqbal menilai, kasus kebocoran data yang begitu banyak membuktikan ada persoalan serius terkait sistem keamanan data.

"Sebagai contoh pada 2020, terjadi kebocoran 230 data pasien Covid-19. Kemudian, 91 juta akun Tokopedia dan 13 juta akun Bukalapak. Kebocoran data kembali terjadi pada tahun 2021. Ada 2 juta data nasabah BRI Life beserta dokumen penting yang dicuri hacker," ungkapnya.

Menurutnya, data-data yang bocor tersebut sangat rawan diperjualbelikan.

"Yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krisis perlindungan data pribadi. Kalau boleh saya gambarkan, penyimpanan data di Indonesia cukup lemah," ujarnya.

Dia menambahkan, jika data diambil hacker kemudian dijual di dunia maya, maka masyarakat akan menjadi korban. Misalnya, tiba-tiba menerima tagihan.

"Pada era digitalisasi, kejahatan begitu ekstrim. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus melakukan penguatan penyimpanan data," tandasnya.

Penguatan penyimpanan data tersebut juga meliputi perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan swasta, pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya.

"Kemudian, harus ada koordinasi yang terpadu antara Kominfo sebagai *leading sector*, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Polri. Sehingga jika terjadi kebocoran data di satu perusahaan, maka penelusuran

dapat dengan cepat dilakukan," tegasnya.

Mempersempit

Sementara itu, Staf Ahli Menkominfo Henri Subianto mengungkapkan, adanya RUU PDP diharapkan dapat mempersempit adanya penyalahgunaan data yang bocor. Apalagi, ada ancaman sanksi hingga triliunan rupiah.

"RUU PDP sangat penting, terlebih aturannya masih tersebar di beberapa UU dan peraturan pemerintah. Ada banyak persoalan, seperti sebenarnya persoalan keamanan siber bukan tanggung jawab Kominfo, melainkan tanggung jawab Badan Siber dan Sandi Negara. Hanya saja, anggarannya tidak cukup," tandas Henri.

Terpisah, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anas Ma'ruf mengatakan, pihaknya tengah menginvestigasi kebocoran data pengguna aplikasi Electronic Health Alert (e-

HAC) Kemenkes. Anas menduga, data pengguna yang bocor terjadi di pihak mitra.

"Ini sudah diketahui oleh pemerintah," kata Anas melalui kanal *Youtube* Kemenkes RI.

Dia juga mengungkapkan, kebocoran data terjadi pada aplikasi e-HAC yang lama dan sudah dinonaktifkan sejak 2 Juli 2021. Saat ini, pelaku perjalanan dapat menggunakan e-HAC yang telah terintegrasi dengan aplikasi *PeduliLindungi* dengan infrastruktur yang berbeda dari sebelumnya.

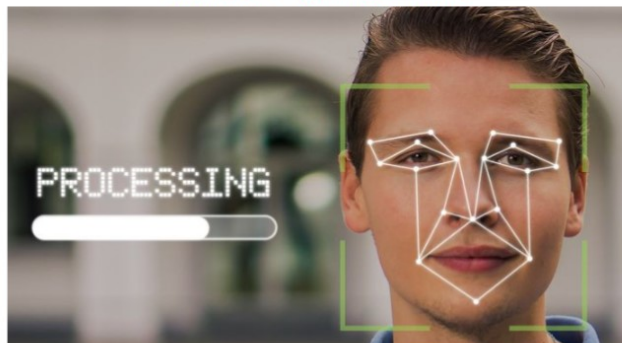
E-HAC yang terintegrasi dengan aplikasi *PeduliLindungi* itu memiliki infrastruktur di pusat data nasional, sehingga terjamin keamanannya dan didukung oleh Kemenkominfo dan BSSN.

"Ini satu paket. Seluruh informasi/sistem terkait pengendalian Covid-19 dipindahkan ke dalam pusat data nasional," tandasnya. (H28-41)

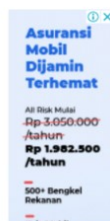
Judul	Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: Perlindungannya Tak Cukup UU ITE
Nama Media	Pikiran-rakyat.com
Newstrend	RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
Halaman/URL	https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012506274/indonesia-darurat-kebocoran-data-politisi-nasdem-pelindungannya-tidak-cukup-dengan-uu-ite
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: Perlindungannya Tak Cukup UU ITE

Nurul Khadijah - 1 September 2021, 11:12 WIB



Ilustrasi kebocoran data. /PIXABAY/Tumisu



PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini Indonesia kembali mengalami kasus kebocoran data pribadi masyarakat, melalui aplikasi e-HAC. Hal itu diungkap VPN Mentor, situs yang fokus pada Virtual Private Network (VPN), melaporkan adanya dugaan kebocoran 1.3 juta data pada Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Electronic Health Alert Card/e-HAC).

Aplikasi e-HAC yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menampung data e-HAC, dan memverifikasi penumpang yang melakukan perjalanan selama pandemi Covid-19.

Menyoroti kasus tersebut, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan Indonesia sudah dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi.

Hal ini dibuktikan kasus kebocoran data pribadi meningkat secara kuantitas, sehingga kebutuhan akan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data independen sangat tinggi.

Baca Juga: [Viral Ragil Mahardika Pamer Kemesraan Bersama Suami di Jerman, Sang Ibu: Pulang Tinggal Kuku...](#)

"Awalnya kebocoran dari pihak swasta, Bukalapak, Tokopedia, tetapi kemudian data BRI Life yang bocor juga BPJS, apalagi hari ini keluar berita di Kemenkes yang juga soal kebocoran e-HAC," kata Farhan dalam diskusi bertajuk "Nasib RUU Pelindungan Data Pribadi" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.

Politisi dari Fraksi NasDem itu menjelaskan, solusi yang pas saat ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi, menurutnya, perlindungan data pribadi tidak cukup dengan UU ITE.

Lebih lanjut Farhan menambahkan, Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) ini ingin melahirkan sebuah profesi baru yaitu data protection officer, yang akan membantu para penguasa data untuk mengelola penyimpanan, penguasaan dan pengolahan data pribadi agar sesuai dengan UU.

"Bisa juga lembaga atau protection officer ini juga dalam posisi di level sebuah perusahaan atau lembaga. Kalau di perbankan bisa kita samakan dengan direktur compliance dan mitigasi risiko," katanya.

Judul	Kebocoran Data Kembali Terjadi, Pemerintah Didesak Serious Bahas UU PDP
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
Halaman/URL	https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/11334161/kebocoran-data-kembali-terjadi-pemerintah-didesak-serius-bahas-uu-pdp
Tanggal Berita	2021-09-01
Sentimen	Netral

Home / News / Nasional

Kebocoran Data Kembali Terjadi, Pemerintah Didesak Serious Bahas UU PDP

Kompas.com - 01/09/2021, 11:33 WIB

BAGIKAN: [Facebook](#) [Twitter](#) [WhatsApp](#) [Telegram](#)

Komentar 0



Ilustrasi kejahatan digital, data pribadi, peretasan, peretasan digital, hacker (Shutterstock)

Penulis: Nicholas Ryan Aditya | Editor: Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksmono mendesak pemerintah segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Menurut Dave, hal tersebut penting disegerakan mengingat banyaknya kasus dugaan kebocoran data masyarakat Indonesia.

Terbaru, dugaan kebocoran data pengguna di aplikasi Electronic Health Alert (e-HAC) Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Pemerintah harus segera menyelesaikan keamanan data dengan merampungkan UU PDP dan juga meningkatkan pengamanan server-server penyimpanan data," kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Ini Penjelasan Kemenkes soal Dugaan Kebocoran Data Pengguna E-HAC

Dave menyangkan kasus dugaan kebocoran data kembali terjadi. Sebelumnya, ramai diberitakan kebocoran data juga terjadi terhadap 2 juta data nasabah BRI Life.

Tak sampai di situ, kebocoran data juga pernah diduga terjadi terhadap data BPJS Kesehatan yang ramai dibicarakan pada Mei 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan *insight* di email kamu.
[Daftarkan email](#)

"Semua data yang disimpan pemerintah, seharusnya sudah tersentralisasi, sehingga pengawasan dan pengamanan dapat terjamin," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai proses pembahasan RUU PDP, Dave mengaku belum mengetahui perkembangan terkini.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Tak Capai Titik Temu Soal Otoritas Pengawas dalam RUU PDP

Namun, politisi Partai Golkar tersebut menyebut adanya kendala dalam pembahasan antara Komisi I DPR dan pemerintah.

"Saya belum memonitor lagi sekarang di mana, tapi terakhir saya cek mandek di pembahasan," ucap dia.

Dave tak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kendala pembahasan RUU PDP tersebut. Akan tetapi, ia mendorong adanya Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai salah satu solusi keamanan data digital masyarakat.

Lembaga ini juga sudah didorong oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR tentang RUU PDP. Menurut dia, lembaga tersebut harus strategis, independen dan berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Sebaiknya, penyimpanan dan pengawasan adalah lembaga terpisah di bawah presiden langsung," tutur Dave.

Manfaat All Risk Hingga Mobil 12 Tahun

500+ Bengkel Rekanan

Klaim Mudah Semua Kerusakan

Premi All Risk mulai
Rp 2.083.000/Thn
Rp 1.458.000/Thn

Cuma di lifep

CEK SEKARA

TERPOPULER

- 1 Kemenkes Sebut Va Nusantara Tak Bisa Dikomersialkan
Dibaca 15.611 kali
- 2 Ironi Bersejarah, Sai Bebas dan Penyidik Menangkap Dibe
Dibaca 12.446 kali
- 3 Usai Putusan MK, J Diminta Ikuti Rekon Komnas HAM-Omb
Dibaca 10.388 kali
- 4 UPDATE 1 Septem Covid-19 di Indones Juta, Tambah 10.3
Dibaca 6.240 kali
- 5 Menagih Janji Joko Regulasi Perlindun Pribadi...
Dibaca 3.480 kali

Dave mengatakan, **Komisi I** saat ini masih menunggu persetujuan **pemerintah** terkait pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi tersebut. Ia meminta pemerintah serius dalam membahas **RUU PDP** hingga menjadi Undang-Undang yang dibutuhkan masyarakat.

Salah satu keseriusan itu, saran Dave, adalah dengan pemerintah bisa melakukan perekrutan para ahli non konvensional seperti *hacker*.

Menurut dia, *hacker-hacker* atau peretas tersebut justru bisa dijadikan hal positif dengan bertugas melindungi kedaulatan siber Indonesia.

"**Pemerintah** harus proaktif merekrut para ahli-ahli non konvensional seperti *hacker*. Agar mereka bisa diubah menjadi pembela kedaulatan siber kita," kata Dave.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi **Kemenkes** Anas Ma'ruf membenarkan adanya dugaan **kebocoran data** pengguna aplikasi **e-HAC Kemenkes**.

Anas mengatakan, data pengguna yang bocor terjadi di aplikasi e-HAC yang lama, bukan pada e-HAC yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

"Yang pertama, kebocoran data terjadi di aplikasi e-HAC yang lama yang sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021, tepatnya 2 Juli 2021," kata Anas dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Kemenkes RI, Selasa (31/8/2021).

Judul	Kebocoran Data Seolah Dibiarkan Terus Terjadi
Nama Media	Kompas
Newstrend	RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
Halaman/URL	3
Tanggal Berita	2021-09-02
Sentimen	Netral

Kebocoran Data Seolah Dibiarkan Terus Terjadi

Instansi pengelola data pribadi tak belajar dari kasus-kasus kebocoran sebelumnya. RUU Perlindungan Data Pribadi tak kunjung dituntaskan.

JAKARTA, KOMPAS — Kebocoran data pribadi masih terus terjadi. Sebelum dugaan kebocoran dalam aplikasi e-HAC yang dikelola Kementerian Kesehatan, kebocoran data pribadi berturut-turut terjadi di sejumlah instansi publik dan swasta. Kebocoran berulang menunjukkan tak adanya upaya sungguh-sungguh dari instansi pengelola data pribadi untuk menjaga sistemnya. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diyakini bisa meminimalkan kebocoran data pribadi tak kunjung dituntaskan pemerintah dan DPR.

Data pribadi dalam aplikasi e-HAC diketahui bocor pada Selasa (31/8/2021). Sebuah situs pengulas perangkat lunak VPN, vpnMentor, memublikasikan temuan kebocoran data bank data e-HAC yang pertama kali diketahui pada 15 Juli 2021. VpnMentor menjelaskan, kebocoran data aplikasi e-HAC terjadi karena pengembang gagal mengimplementasikan protokol privasi data yang memadai.

Ruang lingkup data pribadi yang bocor mencakup data hasil tes Covid-19, akun e-HAC, rumah sakit, data pribadi pengguna (nomor induk kependudukan atau NIK, paspor, nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nama orangtua), serta data data petugas pengelola e-HAC.

Kasus kebocoran data ini menambah panjang kasus serupa yang pernah terjadi tak hanya di institusi publik, tetapi juga privat. Ambil contoh, kebocoran data dari sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan, BRI Life, Tokopedia, dan Bukalapak.

"Ini menunjukkan kita tidak pernah belajar. Para pengendali data kita belum menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data semestinya karena memang saat ini acuan regulasinya belum ada. Namun, setidaknya kalau ada hasil investigasi dari kasus kebocoran sebelumnya, dan ada rekomendasi dari investigasi itu, semestinya pengendali data yang lain dapat mempelajarinya," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, saat dihubungi, Rabu (1/9).

Dengan belum adanya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), pengelolaan data pribadi milik publik diatur oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di UU ITE, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi pihak pertama yang melakukan investigasi ketika terjadi kebocoran sebelum investigasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama pihak kepolisian.

Perkuat sistem

Kalaupun tak ada hasil investigasi atas kasus kebocoran sebelumnya dan belum ada acuan regulasi untuk perlindungan data, menurut Wahyudi, instansi publik atau privat yang mengelola data pribadi seharusnya dapat mengevaluasi sekaligus meningkatkan sistem perlindungan data pribadi. Termasuk di dalamnya mengaudit secara berkala keamanan sistemnya. Ini penting dilakukan menyusul terus terjadinya kasus kebocor-

an data pribadi.

Yang juga penting, pemerintah dan DPR mengakselerasi pembahasan RUU PDP. Undang-undang itu akan mengatur prinsip-prinsip perlindungan data, selain memastikan instansi pengelola data menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Begitu pula sanksi jika hal itu tak diterapkan instansi.

Hingga kini, RUU PDP masih belum tuntas dibahas Komisi I DPR bersama Kemenkominfo. Perbedaan persepsi antara pemerintah dan mayoritas anggota Komisi I terkait otoritas pengawas PDP menjadi ganjalan. Pemerintah menginginkan otoritas itu di bawah Kemenkominfo. Adapun mayoritas anggota Komisi I menginginkan otoritas independen meski bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam diskusi membahas RUU PDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9), anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Iqbal, tetap meyakini titik temu akan tercapai dalam pembahasan lanjutan RUU PDP. Sebab, sekalipun berbeda pendapat, pemerintah dan Komisi I DPR memiliki komitmen yang sama, yakni agar kebocoran data pribadi tak terus terjadi.

Tutup kerentanan sistem

Terkait laporan kebocoran data pribadi dalam aplikasi e-HAC, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Anas Ma'ruf membantahnya. "Kemenkes memastikan bahwa data masyarakat yang ada di dalam sistem e-HAC tidak bocor

dan dalam perlindungan. Data masyarakat yang ada di dalam e-HAC juga tidak mengalir ke platform mitra," katanya.

Anas menyampaikan, yang ditemukan hanya kerentanan dari platform mitra e-HAC. Informasi kerentanan setelah diverifikasi BSSN dilaporkan kepada Kemenkes pada 25 Agustus. Penelusuran dilakukan yang langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Tak hanya itu, Kemenkes juga telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, serta Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk menginvestigasi dan memastikan tak ada kerentanan lain pada e-HAC.

Juru Bicara BSSN Anton Setiawan menjelaskan, vpnMentor telah mengirim kabar soal kerentanan aplikasi e-HAC salah satunya ke alamat surat elektronik milik Tim Tanggap Insiden BSSN pada 22 Agustus. BSSN lantas menindaklanjuti laporan itu dan berkoordinasi dengan pihak Kemenkes.

Hasilnya, menurut dia, pada 25 Agustus, tim dari Kemenkes telah menindaklanjutinya dengan menutup kerentanan pada aplikasi e-HAC. Kerentanan itu berdampak pada dimungkinkannya data untuk diakses secara langsung oleh pihak lain tanpa ada otentikasi. "Jadi, data yang ada masih tersimpan dengan baik," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, saat ini polisi tengah menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut.

(REK/NIA/TAN/MED)

Judul	Indonesia Darurat Kebocoran Data Pribadi
Nama Media	Fajar
Newstrend	RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
Halaman/URL	2
Tanggal Berita	2021-09-02
Sentimen	Netral

Indonesia Darurat Kebocoran Data Pribadi

EDITOR M ARMAN K. SEWANG

JAKARTA, FAJAR — Rentetan kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia dipandang sudah dalam kondisi darurat. Apalagi, kebocoran data tidak hanya pada sektor swasta, tetapi juga pemerintah.

HAL tersebut ditegaskan, anggota Komisi IDPRRI, Muhammad Farhan. Menurutnya, kasus kebocoran data pribadi meningkat secara kuantitas. Ia menilai, perlunya regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data inde-

penden sangat tinggi.

"Awalnya kebocoran dari pihak swasta, Bukalapak, Tokopedia, tetapi kemudian data BRI Life yang bocor juga BPJS, apalagi hari ini keluar berita di Kemenkes yang juga soal kebocoran e-HAC," kata Farhan, Rabu, 1 September.

Politisi NasDem itu menjelaskan, solusi yang pas saat ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, menurutnya, perlindungan data pribadi tidak cukup dengan UU ITE.

Farhan menambahkan, RUU PDP ini ingin melahirkan sebuah profesi baru. Ya itu data protection officer, yang akan membantu para penguasa data untuk mengelola penyimpanan, penguasaan dan pengolahan data pribadi agar sesuai dengan UU.

"Bisa juga lembaga atau protection officer ini juga dalam posisi di level sebu-

ah perusahaan atau lembaga. Kalau di perbankan bisa kita samakan dengan direktur compliance dan mitigasi risiko. Jadi, ini posisi yang sangat tinggi, karena kalau sampai salah, dalam penguasaan dan pengelolaan data pribadi, maka ada sanksi yang menarik di RUU PDP. Tidak ada kriminalisasi, di RUU PDP ini akan ada denda yang sangat besar," jelasnya.

Meski menargetkan RUU PDP akan disahkan dalam tahun ini, akan tetapi soal keberadaan lembaga independen perlindungan data masih dalam perdebatan. Ia mengatakan, otoritas perlindungan data pribadi harus ada induknya, maka di-

perlukan sebuah lembaga yang punya otoritas yang kuat. Farhan menilai mim-pinya bisa seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Anas Ma'ruf menegaskan tak ada kebocoran data masyarakat di sistem eHAC. Seluruh data berada dalam perlindungan.

"Data masyarakat yang ada di eHAC tidak mengalir ke platform mitra. Sedangkan data masyarakat yang ada di platform mitra adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, sesuai dengan amanat UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi elektronik atau UU ITE," tegasnya. (fin/*)